

DAFTAR PERUBAHAN DALAM
RUU TNI YANG BARU DISAHKAN

Pasal 3 tentang kedudukan TNI

Perubahan Pasal 3 UU Nomor 34 Tahun 2025 mengubah kedudukan TNI. Semula, TNI berada di bawah koordinasi Departemen Pertahanan dalam kebijakan dan strategi pertahanan. Setelah revisi, TNI dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan dalam strategi pertahanan dan dukungan administrasi terkait perencanaan strategis.

Pasal 7 tentang tugas pokok TNI

Menurut UU Nomor 34 Tahun 2004, TNI memiliki tugas pokok yang terdiri dari operasi militer (OMP) untuk perang dan operasi militer selain perang (OMSP). Sebelum direvisi, Pasal 7 UU TNI menjelaskan bahwa terdapat 14 tugas OMSP, yakni:

- Mengatasi gerakan separatis dan pemberontakan bersenjata.
- Menangani aksi terorisme.
- Mengamankan perbatasan dan objek vital strategis.
- Melaksanakan misi perdamaian dunia.
- Mengamankan Presiden, Wakil Presiden, dan keluarganya.
- Memberdayakan wilayah pertahanan dan pendukungnya sejak dini.
- Membantu pemerintahan daerah.
- Mendukung Polri dalam keamanan dan ketertiban.
- Mengamankan tamu negara setingkat kepala negara.
- Menanggulangi bencana alam dan bantuan kemanusiaan.
- Melakukan pencarian dan pertolongan (search and rescue).
- Mengamankan pelayaran dan penerbangan dari ancaman kejahatan.

Dalam revisi yang disahkan DPR, terdapat dua tugas OMSP tambahan, yakni:

- membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber;
- membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri.

Pasal 47 tentang posisi sipil yang bisa

diisi tentara aktif

DPR meloloskan revisi Pasal 47 UU TNI, menambah jabatan sipil yang bisa diisi tentara aktif. Awalnya hanya 10 kementerian/ lembaga, kini menjadi 14, meski mendapat penolakan dari koalisi sipil. Berikut daftar 14 kementerian/ lembaga yang boleh diisi prajurit TNI aktif dalam UU terbaru:

- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara
- Pertahanan Negara, termasuk Dewan Pertahanan Nasional
- Kesekretariatan Negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden
- Intelijen Negara
- Siber dan/Sandi Negara
- Lembaga Ketahanan Nasional Badan Pencarian dan Pertolongan (SAR)
- Badan Narkotika Nasional
- Badan Pengelola Perbatasan
- Badan Penanggulangan Bencana
- Badan Penanggulangan Terorisme
- Badan Keamanan Laut
- Kejaksaan Republik Indonesia
- Mahkamah Agung

Pasal 53 tentang batas usia pensiun

Perubahan berikutnya adalah tentang batas usia pensiun bagi prajurit TNI. Dalam UU TNI sebelum revisi, usia pensiun prajurit perwira adalah paling lama 58 tahun, sementara untuk bintang dan tamtama adalah 53 tahun. Sementara dalam UU TNI pasca-revisi, batas usia pensiun diatur berdasarkan jenjang yang lebih spesifik dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bintang dan tamtama: 55 tahun
- Perwira hingga pangkat kolonel: 58 tahun
- Perwira tinggi bintang 1: 60 tahun
- Perwira tinggi bintang 2: 61 tahun
- Perwira tinggi bintang 3: 62 tahun
- Perwira tinggi bintang 4: 63 tahun dan dapat diperpanjang dua kali sesuai kebutuhan dengan Keputusan Presiden.

USAI UU TNI DISAHKAN,
KEMUDIAN...Aksi Mahasiswa Dibubarkan Paksa:
Gas Air Mata, Pentungan hingga Ditahan

Di tengah pusaran badai protes penolakan, RUU TNI akhirnya sah menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di kompleks parlemen, Jakarta pada Kamis (20/3/2025). Polisi membubarkan paksa unjuk rasa mahasiswa di berbagai daerah. Massa di depan gerbang utama Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, yang terdesak sempat melempari petugas dengan petasan hingga batu sebelum akhirnya membubarkan diri. Situasi di depan gedung parlemen pada pukul 19.40 WIB memanas. Para demonstran melemparkan petasan dan benda-benda lainnya, seperti batu hingga botol, ke dalam kompleks parlemen. Polisi yang berada di dalam kompleks membalas dengan menembakkan air menggunakan water cannon. Polisi mengimbau kepada para mahasiswa untuk menghentikan aksi yang dapat berisiko menimbulkan kerusuhan. Saat upaya pukul mundur itu, tertangkap momen polisi menggunakan tongkat kepada warga di lokasi. Diketahui satu orang terluka. Demo di depan kantor DPRD Jawa Tengah juga memanas. Sebanyak empat peserta unjuk rasa ditahan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Sebelumnya polisi menangkap lima orang dan dilepaskan satu. Sementara massa Jogja Memanggil hingga berita ini dibuat masih bertahan dan berencana akan bermalam di kantor DPRD DIY. Kritikan juga terus digaungkan kalangan akademisi dan para pakar. Namun, pemerintah dan DPR bergeming, tetap memutuskan pengesahan UU TNI yang baru. Tak sekadar pasal-pasal yang kontroversialnya, tapi proses yang terkesan eksklusif dan elitis disoroti. Kini usai disahkan, berbagai dampak dan kekhawatiran muncul. Salah satu yang didengarkan warga adalah menguatnya kembali aroma orde baru.

Baca Hal 11....



JAKARTA- Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, aksi teror kepala babi yang dikirim ke Kantor Tempo merupakan bentuk tindakan kekerasan terhadap pers atau media.

"Pengiriman kepala babi dengan mengatasnamakan Cica BAP (Bocor Alus Politik) adalah tindakan kekerasan kepada pers," ujar Ninik, Kamis (20/3/2025) malam.

Ninik menuturkan, pengiriman kepala babi yang kedua telinganya sudah terpotong itu jelas merupakan aksi teror dan intimidasi. "Ini jelas teror, intimidasi yang secara langsung untuk menakut-nakuti," ucap dia.

Biasanya, kata Ninik, aksi teror seperti ini dilakukan oleh pihak-pihak yang terpojok, tetapi tidak mau bertanggung jawab.

"Sebagai ketua Dewan Pers, saya mengimbau kepada semua pihak yang keberatan atas pemberitaan, mereka memiliki hak jawab. Gunakan hak jawab tersebut sebaik-baiknya," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Kantor Tempo mendapat kiriman kepala babi, pada Rabu (19/3/2025).

Kepala babi tersebut dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam. Kotak berisi kepala babi tersebut ditujukan kepada Cica, yang

merupakan nama panggilan Francisca Christy Rosana, wartawan desk politik dan host siniar Bocor Alus Politik (BAP).

Paket tersebut diterima satpam kantor Tempo sekitar pukul 16.15 WIB. Cica baru menerima paket pada Kamis (20/3/2025) sekitar pukul 15.00 WIB.

Cica baru pulang dari liputan bersama Hussein Abri Yusuf Muda Dongoran. Mendapat informasi ada paket kiriman untuknya, Cica lalu membawa kotak kardus tersebut ke kantor.

Ketika styrofoam terbuka, Hussein melihat isinya kepala babi. Ia dan Cica serta beberapa wartawan membawa kotak kardus itu keluar gedung.

Setelah kotak kardus sudah dibuka seluruhnya, terpampang di sana kepala babi. Kedua telinganya terpotong.

Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra mengatakan kiriman paket berisi kepala babi tersebut sebagai bentuk teror terhadap kebebasan pers.

"Kami sedang menyiapkan langkah-langkah selanjutnya sebagai respons atas kejadian ini," kata Setri. (wid, rls, kcm/dya)

Paket berisi kepala babi yang ditujukan kepada wartawan Tempo, Francisca Christy Rosana di kantor Tempo, Palmerah, Jakarta, Kamis (20/3/2025). (Ist)



Teror Kepala Babi di Kantor Tempo, Ketua Dewan Pers: Kekerasan Terhadap Media

Pemerintah dan DPR Sepakat Hapus Utang Istaka Karya ke BUMN

JAKARTA-Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR menyepakati penghapusan utang PT Istaka Karya (Persero) kepada vendor-vendor yang meruapakan perusahaan pelat merah.

Hal itu dikatakan Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf, berdasarkan keputusan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR bersama Kementerian BUMN yang berlangsung secara tertutup di Kompleks DPR RI, Selasa (18/3/2025), khusus membahas penyelesaian utang Istaka Karya.

"Hasil kemarin RDP kesimpulannya seperti itu (BUMN hapus utang Istaka Karya). Lagi dikaji biar governance-nya terpenuhi," katanya saat ditemui usai Peresmian KEK Industropolis Batang, Kamis (20/3/2025).

Aminuddin mengatakan, jika tata kelola (governance) tersebut sudah terpenuhi, maka Istaka Karya bisa mengutamakan pembayaran utang kepada vendor-vendor non BUMN.

Dia juga memastikan pemerintah tetap mengkaji kembali dampak dari keputusan hapus utang Istaka Karya itu kepada kinerja keuangan masing-masing BUMN yang menjadi kreditor.

"Kalau itu terpenuhi untuk teman-teman BUMN bisa mendahulukan kepentingan vendor-vendor yang dari UMKM," lanjutnya.

Sebelumnya, Komisi VI DPR RI mengadakan Rapat Kerja (raker) sekaligus Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara tertutup bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Dony Oskaria pada Jumat (28/2/2025).

Raker dan RDP ini juga dihadiri para vendor yang berkaitan dengan masalah PT Istaka Karya, eks BUMN yang telah dibubarkan sejak tahun 2023 karena mengalami pailit.

Meskipun telah dibubarkan, PT Istaka Karya masih memiliki piutang kepada para vendor mencapai Rp 786 miliar dari 179 vendor yang kala itu menggarap beberapa proyek.

Hingga kini, masih banyak vendor yang belum dibayar. Salah satunya vendor dari proyek Jalan Tol Ir Sedyatmo tahun 2007-2008. Proyek tersebut belum dibayar Istaka Karya sejak tahun 2011. Dalam laporan Tempo berjudul 'Cerita Pahit Para Kontraktor Istaka Karya: Ada yang Terjerat Utang Bank' Ketua Persatuan Rakyat Korban BUMN Istaka Karya (Perkobik) Bambang mengatakan setidaknya ada 300 anggota perkobik yang memiliki tagihan kepada Istaka senilai Rp800 miliar. Sebagian besar dari mereka yang berstatus pengusaha kecil dan menengah itu tak kunjung mendapat hak mereka.

Wakil Ketua Komisi VI DPR dari

Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade membeberkan, raker dan RDP itu telah bersepakat dengan Kementerian BUMN dan seluruh perusahaan BUMN yang memiliki urusan dengan PT Istaka Karya.

"Kita bersepakat tadi untuk penyelesaiannya. Bagaimana kita mengambil keputusan dengan asas berkeadilan. Nah, gitu aja," kata Andre kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Andre mengungkapkan Komisi VI DPR sepakat bakal mengutamakan nasib para vendor UMKM yang masih belum dibayar oleh PT Istaka. (wid, rls, ist/dya)

BUMN KARYA YANG MEMILIKI UTANG DI BANK HIMBARA

1. PP

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, PP tercatat memiliki utang bank jangka pendek kepada pihak berelasi sebesar Rp 3.629.398.467.158. Pihak berelasi ini mencakup perbankan yang tergabung dalam Bank Himbara. Berikut rinciannya:

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Rp 1.481.283.470.699
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Rp 1.157.097.150.934
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Rp 540.958.445.525
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Rp 447.359.400.000
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Rp 2.700.000.000

Kemudian, untuk utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang kepada pihak berelasi sebesar Rp 7.302.766.676.898. Berikut rinciannya:

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Rp 5.009.438.240.072
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Rp 1.160.574.325.010
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Rp 807.642.438.070
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Rp 325.111.673.746

2. Adhi Karya

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, Adhi Karya tercatat memiliki utang bank dan lembaga jasa keuangan lainnya jangka pendek kepada pihak berelasi sebesar Rp 2.507.965.628.137. Berikut rinciannya:

- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Rp 756.341.426.441
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Rp 985.500.000.001
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Rp 671.124.201.695
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Rp 95.000.000.000 (melalui entitas anak Adhi Karya yakni Adhi Persada Gedung/APG)

Sementara untuk utang bank dan lembaga jasa keuangan lainnya jangka panjang kepada pihak berelasi tercatat sebesar Rp 1.166.297.635.436. Rinciannya meliputi:

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Rp 496.875.000.000
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Rp 494.433.262.719 (melalui entitas anak Adhi Karya yakni Adhi Persada Properti/APP)
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Rp 49.427.372.717 (melalui entitas anak Adhi Karya yakni Adhi Persada Properti/APP)
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Rp 125.562.000.000 (melalui entitas anak Adhi Karya yakni Adhi Commuter Properti/ACP)

Dengan demikian, Adhi Karya tercatat masih memiliki utang kepada Bank Himbara sebesar Rp 3.674.263.263.573 alias sekitar Rp 3,6 triliun.



RUU KUHP Diklaim Tak Ubah Kewenangan Aparat Penegak Hukum



Ketua Komisi III DPR
Habiburokhman



Menteri Koordinator
Bidang Hukum, HAM, Imigrasi,
dan Masyarakat
Yusril Ihza Mahendra

JAKARTA-Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menekan surat presiden untuk membahas Revisi Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Komisi III pun bakal segera membahas RUU KUHP sebagai tindak lanjut surpres tersebut.

"Draf final rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan dibahas segera, karena surpresnya per hari ini sudah keluar, sudah ditandatangani Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto," kata Habib di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Dia menjelaskan RUU KUHP akan mengatur perubahan sejumlah hal terkait mekanisme acara pidana, mulai dari penyidikan hingga keadilan restoratif.

Habiburokhman menjelaskan RUU ini akan mengganti undang-undang yang sudah berjalan selama 44 tahun. Tak hanya itu, kata dia, RUU ini juga akan menyesuaikan KUHP baru yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

"Kalau hukum materialnya baru, logikanya hukum formil, hukum acaranya juga harus baru menyesuaikan nilai-nilainya," ucap Habiburokhman.

"Ya, intinya nih harus digaris-bawahi bahwa KUHP baru tidak mengubah kewenangan aparat

penegak hukum dalam sistem peradilan pidana," sambungnya.

Dia menjelaskan rapat kerja pembahasan RUU KUHP akan dilaksanakan pada awal masa sidang DPR berikutnya. Adapun DPR akan memasuki masa reses pada pekan depan hingga pertengahan April 2025.

"Jadi paling lama dua kali masa sidang. Jadi ini belum dihitung ya. Kita baru akan kick off-nya, rakernya kemungkinan ya, kemungkinan di awal masa sidang yang akan besok," tutur dia.

Yusril Harap Selesai Sebelum Akhir Tahun

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Masyarakat Yusril Ihza Mahendra menyebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru akan rampung pada akhir tahun 2025, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru berlaku mulai Januari 2026.

"KUHP akan berlaku Januari 2026. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini KUHP bisa selesai, jadi supaya tidak terjadi lagi ketimpangan," ucap Yusril saat ditemui di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Dia menjelaskan penyusunan KUHP baru menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum yang dipimpin Supratman Andi Agtas.

Daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait revisi KUHP juga telah diajukan.

"Selama ini berjalan mulus, Pak Supratman tidak perlu mengonsultasikannya dengan kami. Kalau sekiranya ada beberapa hal-hal yang krusial, tentu barangkali perlu diangkat ke rapat koordinasi untuk diselesaikan," ujar Yusril.

Menurut Menko Yusril, KUHP yang baru ini akan menjamin hak asasi manusia. Salah satu bentuknya ialah penegasan mengenai batas waktu status tersangka terhadap seseorang yang bermasalah dengan hukum.

"KUHP baru telah menyatakan bahwa orang dinyatakan tersangka itu tidak boleh lebih dari dua tahun. Itu dalam draf. Jadi kalau penyidik menyatakan orang itu melakukan kejahatan, dua tahun dia kumpulkan alat bukti tidak kunjung dapat, ya, sudah orang itu harus dilepaskan," ujarnya.

"Buat apa orang disiksa terus-menerus dinyatakan tersangka kan menjadi beban morel bagi orang yang bersangkutan," Yusril menambahkan.

Batas waktu status tersangka sebelumnya tidak diatur dengan tegas dalam KUHP yang lama. Oleh karena itu, selain menjamin hak asasi manusia, Menko Yusril meyakini bahwa KUHP baru juga menjamin keadilan dan kepastian hukum. (din, ist, ant/day)

PASAL KONTROVERSIAL RKUHP

Aturan Pelanggaran

HAM Berat (Bab XXXVIII)

- Hukuman lebih ringan
- Penyelesaian di luar proses hukum bisa jadi alasan gugurnya tuntutan Ancaman Kebebasan Sipil

Ancaman Kebebasan Sipil

- Muncul pasal tentang penghinaan terhadap Presiden dan pejabat terhadap pemerintah (Pasal 238, 239, 259)
- Larangan penyebaran ajaran komunisme/ marxisme-leninisme (Pasal 206-207)
- Membatasi kerja pers yang meliput sidang di pengadilan (Pasal 304-305)

Pasal Hukuman Mati

- Ancaman pidana Hukuman mati bertentangan dengan konstitusi

Pasal Penyiksaan (Pasal 613)

- Tidak mengatur mereka yang secara tak langsung terlibat

Pasal Zina (Pasal 484-488)

- Diskriminasi terhadap masyarakat miskin dan adat yang perkahannya jarang tercatat negara
- Meningkatkan risiko angka nikah muda

Pasal Pencabulan Anak

(Pasal 490-496)

- Batasan "di bawah 18 tahun, belum kawin, dan berkelakuan baik" mendiskriminasi anak

Pasal Kesehatan Reproduksi

(Pasal 481,483,489)

- Mereka yang menyosialisasikan alat kontrasepsi dapat dipidana

Sumber: Kontras dan LBH APIK, Olah data

Kejati Jatim Geledah 5 Lokasi terkait Korupsi Hibah SMK Rp 65 M Gubernur Khofifah dan Kadindik Jatim Tak Mau Disangkutk

SURABAYA-Kejaksaan Negeri Jawa Timur (Kejati Jatim) mengeledah kantor Dinas Pendidikan Jatim terkait dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pengadaan barang dan jasa untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta pada tahun 2017.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menolak disangkutpautkan dalam dugaan rasuah itu. Khofifah meminta agar namanya tidak diseret dalam pusaran kasus rasuah tersebut dikarenakan peristiwa itu terjadi pada tahun 2017, dua tahun sebelum ia menjabat sebagai gubernur.

"Rek itu lho tahun 2017 rek, ojo dielokno-elokno ta aku rek (rek itu lho tahun 2017, jangan diikutkan saya rek), ya Pak Emil ya," kata Khofifah sambil melirik wajah Wagub Emil usai memimpin Apel ASN di Kantor Gubernur Jatim, Kamis (20/3/2025).

"Saya sudah komunikasi dengan kawan-kawan, tapi ya sudahlah, kan sampean tahu, 2017 kami belum di sini (Pemprov Jatim)," ujarnya.

Khofifah pun mengajak semua unsur di lingkungan Pemprov Jatim agar menerapkan kehati-hatian dalam bekerja agar tidak terjerumus dalam kasus korupsi yang merugikan rakyat dan negara.

"Tetaplah kehati-hatian semuanya, kewaspadaan semuanya, kan tadi saya sampaikan kemarin kita dapat penghargaan dari KPK kaitan dengan capaian MCP, tetapi bahwa itu bukan menjadi bagian dari bahwa kita puas dengan kinerja kita, tetap harus kewaspadaan, tetap harus dimitigasi, itu sih," tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai mengungkapkan hal senada. "Nggak ada hubungannya dengan saya, nggak tahu saya karena itu sebelum saya menjabat," ujarnya singkat.

Diketahui, penggeledahan ini sesuai dengan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : Print-33/M.5/Fd.1/01/2025 tanggal 6 Januari 2025.

"Kami melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti yang cukup untuk perkara korupsi mark up pengadaan barang dan jasa untuk sekolah SMK Swasta yang dilakukan pada tahun 2017. Selain di Dinas Pendidikan Jatim kami mengeledah di 5 tempat lainnya," ucap Kepala Kejati (Kajati) Jatim, Mia Amiati, Kamis (20/3/2025).

Mia menyampaikan bahwa pihaknya telah memeriksa sebanyak 25 kepala sekolah SMK swasta

penerima hibah pada 11 kabupaten/ kota di Jatim sebagai saksi.

"Untuk pemeriksaan PPK kami memeriksa Hudiono untuk perkara ini, dan untuk Kepala Dinas Pendidikan Jatim kami memeriksa Syaiful Rachman di dalam penjara yang terkena perkara lainnya," ucapnya.

Mia menjelaskan, dugaan korupsi ini bermula terdapat anggaran paket pekerjaan belanja hibah barang/jasa dengan sumber dana APBD Jatim sebesar Rp 65 miliar pada Dinas Pendidikan Jatim pada 2017.

Pejabat Dinas Pendidikan Jatim membagi dana hibah barang menjadi dua paket pekerjaan atau pengadaan untuk 25 SMK swasta yakni paket 1 meliputi 12 SMK swasta dan paket 2 meliputi 13 SMK swasta dengan cara tender atau lelang.

"Ditetapkan pemenang lelang dari 2 paket pekerjaan yaitu PT Desina Dewa Rizky ditandatangani antara Hudiyono selaku PPK dengan Djono Tehyar selaku Direktur PT



Kejati Jatim saat mengeledah kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pengadaan barang dan jasa untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta pada tahun 2017. Foto: Dok. Kejati Jatim

Desina Dewa Rizky dengan nilai kontrak sebesar Rp 30,5 miliar dan PT Delta Sarana Medika ditandatangani antara Hudiyono selaku PPK dengan Subagio (Alm) selaku Direktur PT Delta Sarana Medika dengan nilai kontrak sebesar Rp 33,06 miliar," jelasnya.

Akan tetapi, barang yang diterima 25 SMK swasta itu terdapat beberapa jenis yang tidak sesuai dengan kebutuhan jurusan di sekolah dan tak sesuai dengan SK Gubernur Jatim No.188/386/KPTS/013/2017 tanggal 21 Juli 2017 serta ditemukan adanya kemahalan harga. (pra, ist, ant/dya)

Mantan Dirut PTPN XI Jadi Tersangka Korupsi Proyek Pabrik Gula



Mantan Dirut PTPN XI, Dolly Parlagutan Pulungan

JAKARTA - Kortas Tipikor Polri menetapkan mantan Dirut PTPN XI, Dolly Parlagutan Pulungan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengembangan dan modernisasi Pabrik Gula (PG) Djatiroto PTPN XI yang terintegrasi Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC) Tahun 2016.

Kakortas Tipikor Polri, Irjen Cahyono Wibowo, mengatakan selain

Dolly, penyidik juga menetapkan mantan Direnbang Bisnis PTPN XI, Aris Toharisman sebagai tersangka.

"Kalau tidak salah sudah ada penetapan dua tersangka. Pertama, Dolly Pulungan dan kedua, Aris Toharisman," kata Cahyono di Mabes Polri, Jakarta, dikutip Kamis (20/3/2025).

Kedua tersangka tersebut, kata dia, melaksanakan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan maupun pembayaran pekerjaan modernisasi pabrik gula Djatiroto tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga menyebabkan proyek belum selesai dan menimbulkan kerugian negara.

Cahyono mengatakan pada tahap perencanaan, proyek dikerjakan tanpa adanya studi kelayakan. Selain itu, kedua tersangka juga telah mengatur pemenang lelang dan pihak KSO Utama-Euroasiatic-Utam Sacrotech (HEU).

Lalu, pada tahap pelelangan, tersangka Aris meminta panitia lelang untuk membuka lelang. Padahal, harga perkiraan sendiri (HPS) masih di-review oleh tim konsultan pengawas.

Selain itu, panitia lelang tetap meloloskan KSO HEU meski tidak memenuhi syarat, seperti tidak memiliki surat dukungan bank dan tidak memiliki workshop di Indonesia.

Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, isi kontrak perjanjian diubah-ubah dan tidak sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dengan menambahkan uang muka 20 persen dan menambahkan pembayaran Letter of Credit (LC) ke rekening luar negeri.

"Tahapan pembayaran procurement yang menguntungkan penyedia tanpa mengikuti prinsip Good Corporate Governance (GCG)," kata Cahyono.

Bahkan, kontrak perjanjian ditandatangani tidak sesuai dengan tanggal yang tertera di kontrak.

Selain itu, pelaksanaan uji performa barang tidak dilakukan secara langsung sehingga barang yang diterima tidak sesuai dengan

spesifikasi yang dipesan.

Terakhir, pada tahap pembayaran, terjadi pembayaran uang muka sebanyak 20 persen. Padahal, uang muka hanya sebesar 15 persen. Selain itu, terdapat kompensasi yang harus ditanggung PTPN XI yang tidak sesuai aturan.

"Atas pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh PTPN XI sampai dengan 90 persen, sementara pekerjaan mangkrak sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara," ucapnya.

Akibat perbuatan tersangka Dolly Parlagutan Pulungan dan Aris Toharisman, negara mengalami kerugian berdasarkan perhitungan BPK RI sebesar Rp570,2 miliar dan 12,8 juta dolar AS.

Keduanya disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (wid, ant/dya)

Dugaan Korupsi Impor Gula Mentah Tom Lembong Dilarang Disiarkan Live, Saksi Singgung soal Jokowi

JAKARTA-Setelah hakim tak menerima eksepsi atau keberatan terdakwa Menteri Perdagangan 2015-2016 Tom Lembong, sidang kasus dugaan korupsi impor gula mentah dilanjutkan ke pemeriksaan saksi.

Dalam sidang perdana pemeriksaan saksi yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, hari ini (20/3/2025), diwarnai larangan hakim bagi awak media untuk menyiarkan langsung sidang.

Saksi dari pegawai Kementerian Perdagangan, Eko Aprilianto Sudrajat, mengatakan, kebijakan impor gula Menteri Perdagangan 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong, telah disampaikan kepada Presiden yang saat itu dijabat oleh Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu diungkapkan Eko saat ditanya oleh Tom Lembong dalam sidang dugaan korupsi importasi gula yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

Awalnya, Tom Lembong menanyakan surat-surat terkait persetujuan impor apakah telah diketahui oleh para menteri kabinet dan atasan menteri, dalam hal ini presiden. "Ya," jawab Eko.

Eko kemudian ditanya kembali oleh Tom Lembong apakah termasuk ke eselon 1 kementerian lain, seperti Kementerian Koordinator Perekonomian. Pemerintah Batalan Kenaikan Tarif PPN 12 Persen secara Umum Artikel Kompas.id "Ada (juga) tembusan ke Presiden, Kapolri, KSAD?" tanya Tom. "Iya," jawab Eko lagi.

Tom Lembong kembali menanyakan, apakah Kementan saat dia menjabat telah melakukan importasi gula dengan transparan. Eko menjawab bahwa setiap ada rapat koordinasi terkait importasi selalu ada media massa dan pemberitaan, termasuk siaran pers yang akan dibagikan kepada media massa untuk ditayangkan sebagai pemberitaan.

Usai persidangan, Tom Lembong juga menjawab dakwaan Jaksa yang menyebutkan mengapa ada kebijakan importasi gula mentah, bukan gula putih yang sudah jadi. Padahal, gula putih yang sudah jadi adalah kewenangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga dakwaan kerugian negara tidak perlu terjadi.

Tom kemudian menyebutkan, kesaksian pegawai Kementan yang didatangkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjawab dengan jelas bahwa stok gula putih saat itu benar-benar tidak ada. "Tadi saksi dari Kementerian Perdagangan mengkonfirmasi bahwa barangnya



Sidang mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dilarang disiarkan live saat pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/3/2025). (ist)

(gula putih) tidak ada. Itu lebih ekstrem daripada pandangan saya, yaitu tidak mencukupi," kata dia.

Selain itu, Tom Lembong menyebutkan kebutuhan gula nasional saat dia menjabat benar-benar sangat darurat karena adanya kenaikan harga di pasar yang mencapai 32 persen per tahun. "Sebuah angka yang tentunya cukup fantastis kalau kita pikir bahwa secara hukum, gula itu termasuk bahan pokok," imbuh dia.

"Jadi, itu tentunya sudah memenuhi, istilah Kementerian Perdagangan, adalah kondisi tertentu yang mewajibkan kita untuk mengambil tindakan, tindakan apapun, untuk meredam tindakan harga seperti itu," ujar Tom.

Di perkara ini, Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatannya dinilai melanggar hukum, memperkaya orang lain maupun korporasi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 578 miliar saat melaksanakan kebijakan importasi gula untuk kebutuhan pangan nasional.

JPU Belum Serahkan Hasil Audit

Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum menyerahkan salinan audit penghitungan kerugian negara pada kasus impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) 2015-2016 ke mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong, yang dijerat sebagai terdakwa dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, pada persidangan Kamis (13/3/2025), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah memerintahkan JPU untuk menyerahkan salinan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) itu ke pihak penasihat hukum terdakwa.

Pada persidangan Kamis (20/3/2025), JPU kembali menegaskan bahwa audit BPKP tersebut merupakan salah satu alat bukti yang akan dikonfirmasi kembali ke saksi ahli pada agenda persidangan. Rencananya, ahli dari BPKP akan dihadirkan untuk menjelaskan soal audit tersebut.

"Atas alat bukti surat tersebut akan dijelaskan secara jelas dan lengkap oleh ahli dari BPKP di saat agenda persidangan pemeriksaan ahli," ujar JPU.

Atas jawaban JPU tersebut, Majelis Hakim menyatakan tetap pada pendiriannya di sidang yang lalu bahwa terdakwa berhak mengetahui dan mempelajari audit tersebut. Namun, karena alasan keberatan JPU itu, Majelis Hakim memutuskan bahwa salinan audit harus diserahkan ke pihak terdakwa dan Majelis Hakim sebelum pemeriksaan ahli dari BPKP.

"Kami wajibkan sebelum pemeriksaan ataupun pengajuan ahli tersebut, auditor dari BPKP, penuntut umum wajib menyerahkan laporan tersebut kepada kami dan juga kepada penasihat hukum. Masalahnya kami juga belum menerima berkas laporan hasil audit tersebut," ujar Hakim Ketua Dennie Arsan.

Pihak penasihat hukum terdakwa sempat meminta Majelis Hakim agar memerintahkan penyerahan salinan audit itu dilakukan seminggu sebelum pemeriksaan ahli. Namun, Majelis Hakim tetap teguh pada sikap sebelumnya. "Tinggal nanti kewajiban penuntut umum ya untuk memenuhi hak Terdakwa, penasihat hukum, untuk menyerahkan laporan hasil audit tersebut. Apabila tidak diserahkan artinya ada pelanggaran hak terdakwa di situ," kata Hakim Ketua Dennie.

Adapun pada persidangan sebelumnya, pihak penasihat hukum Terdakwa yakni Ari Yusuf Amir menuturkan bahwa salinan audit

10 ORANG YANG MENDAPAT KEUNTUNGAN DALAM PERKARA INI

1. Menguntungkan Tony Wijaya Ng melalui PT Angels Products sebesar Rp 144.113.226.287,05 yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT. Angels Products dengan INKOPKAR, INKOPPOL, dan PT PPI;
2. Menguntungkan Then Suriyanto Eko Prasetyo melalui PT Makassar Tene sebesar Rp 31.190.887.951,27 yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT Makassar Tene dengan INKOPPOL dan PT PPI;
3. Menguntungkan Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usahatama Jaya sebesar Rp 36.870.441.420,95 yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT Sentra Usahatama Jaya dengan INKOPPOL dan PT PPI;
4. Menguntungkan Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industry sebesar Rp 64.551.135.580,81 yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT Medan Sugar Industry dengan
5. Menguntungkan Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama sebesar Rp 26.160.671.773,93 yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT Permata Dunia Sukses Utama dengan INKOPPOL dan PT PPI;
6. Menguntungkan Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Furnindo sebesar Rp 42.870.481.069,89 yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT Andalan Furnindo dengan INKOPPOL dan PT PPI;
7. Menguntungkan Hendrogiarto A Tiwow melalui PT Duta Sugar International sebesar Rp41.226.293.608,16 yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT Duta Sugar International dengan PT PPI;
8. Menguntungkan Hans Falita Hutama melalui PT Berkah Manis Makmur sebesar Rp74.583.958.290,80 yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT Berkah Manis Makmur dengan INKOPPOL, PT PPI, dan SKKP TNI-Polri/PUSKOPPOL;
9. Menguntungkan Ali Sandjaja Boedidarmono melalui PT Kebun Tebu Mas sebesar Rp47.868.288.631,27 yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT Kebun Tebu Mas dengan PT PPI;
10. Menguntungkan Ramakrishna Prasad Venkatesha Murthy melalui PT Dharmapala Usaha Sukses sebesar Rp5.973.356.356,22 yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT Dharmapala Usaha Sukses dengan INKOPPOL.

BPKP soal kerugian keuangan negara pada kasus impor gula sebesar Rp578 miliar, penting untuk dijadikan bahan pembelaan terdakwa.

"Kalau hanya dihadirkan sekali lewat pada waktu pembuktian kami tidak punya kesempatan. Memohon pertimbangan Hakim agar ini betul-betul dipertimbangkan secara baik karena persidangan disaksikan seluruh masyarakat Indonesia dan berdampak pada penegakan hukum kita," terangnya di ruang sidang PN Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025). (din, ant, ist/dya)

Kebut Perbaiki Jelang Mudik, Bupati Malang Sebut 85% Jalan Kategori Mantap



Ilustrasi perbaikan jalan di Kabupaten Malang jelang arus mudik Lebaran 2025. (dok. ist)

MALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mempercepat perbaikan dan pemeliharaan jalan menjelang arus mudik Lebaran 2025. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kelancaran lalu lintas serta kenyamanan masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama Ramadan dan Idul Fitri.

Bupati Malang, Sanusi, menyebutkan saat ini sekitar 85 persen jalan di Kabupaten Malang

sudah dalam kondisi baik dan mantap.

Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Khairul Isnadi Kusuma, menyatakan percepatan perbaikan jalan ini dilakukan berdasarkan arahan langsung Bupati Malang. Menurutnya, ada beberapa titik prioritas yang menjadi fokus perbaikan, terutama ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Malang dengan daerah lain, jalan antar kecamatan dan desa, serta akses ke pusat pertumbuhan ekonomi dan destinasi wisata.

"Kami telah melakukan berbagai perbaikan, mulai dari rehabilitasi jalan dengan metode hotmix lapisan lapis aspal beton-lapis aus (Asphalt Concrete-Wearing Course/AC-WC), peningkatan jalan dengan pengecoran maupun pelebaran, hingga program tambal sulam atau Sapu Lobang (Salob)," ujar Khairul, dikonfirmasi

melalui sambungan selular, Kamis (20/3/2025).

Pria yang akrab dengan sapaan Oong ini berharap, langkah ini dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas selama bulan suci Ramadan serta menyambut Idul Fitri dengan aman. "Dengan kondisi jalan yang lebih baik, masyarakat dapat bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat tanpa terkendala masalah infrastruktur," tambahnya.

Sebelumnya, Bupati Malang, Sanusi, menegaskan perbaikan jalan merupakan bagian dari komitmen Pemkab Malang untuk meningkatkan kualitas infrastruktur. Saat ini, sebagian besar jalan di wilayah Kabupaten Malang telah dalam kondisi mantap, meskipun masih ada beberapa titik yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.

"Kami terus melakukan pembenahan terhadap jalan-jalan yang masih berlubang, terutama di jalur utama yang menjadi akses masyarakat maupun wisatawan," ujar Sanusi.

Sanusi juga memastikan akses menuju destinasi wisata di Kabupaten

Malang sudah dipersiapkan dengan baik. Salah satu jalur yang direkomendasikan bagi wisatawan yang ingin menikmati pantai di Malang Selatan adalah melalui Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo. Jalur ini langsung terhubung ke Jalur Lingkar Selatan (JLS), yang memudahkan akses menuju kawasan pantai.

Sementara itu, bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik, jalur Karangates di Kecamatan Sumberpucung menjadi salah satu opsi terbaik. Infrastruktur di wilayah tersebut telah diperbaiki dan siap menampung volume kendaraan yang diprediksi meningkat selama musim mudik.

Namun, Sanusi mengingatkan masih ada jalur yang dalam proses perbaikan, salah satunya akses menuju Pantai Balekambang melalui Desa Srigonco, Kecamatan Bantur. "Proyek perbaikan jalur ini sedang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan pendanaan dari Islamic Development Bank (IsDB). Kami mohon masyarakat bersabar karena prosesnya masih berjalan," jelasnya. (Santi/Dya)

Angkot Kota Malang Pertanyakan THR Lewat Banner, Dishub Tegaskan Tak Punya Kewenangan

MALANG - Sebuah angkutan kota (angkot) di Kota Malang terlihat memasang banner yang mempertanyakan perhatian pemerintah terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Menanggapi hal ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang menegaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan THR kepada sopir angkot.

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan angkutan kota berbeda dengan ojek online. Menurutnya, sopir angkot bekerja secara mandiri tanpa ikatan kerja dengan perusahaan tertentu, berbeda dengan pengemudi ojek online yang memiliki hubungan kerja dengan aplikasi penyedia layanan.

"Karena kalau online itu kan mereka ada ikatan kerja. Sedangkan antara sopir angkutan kota itu mereka mandiri. Bekerja atas dirinya sendiri. Sehingga kami gak ada ikatan kerja. Gak ada kewenangan untuk bahkan memberikan tunjangan hari raya (THR)," ujar Widjaja, Kamis (20/3/2025).

Untuk diketahui, dari pantauan di lapangan pada Rabu (19/3/2025) kemarin, ditemukan sebuah angkot trayek Arjosari-Gadang (AG) yang memasang banner berisi keluhan soal

ketimpangan perhatian pemerintah.

Banner tersebut bertuliskan huruf kapital dan tinta berwarna merah, yang berbunyi "TONGGO SEBELAH (ojek online) OLEH (dapat, red) THR AN, YANG LAHIR DARI PRODUK KAPITALIS. LAH AWAK DEWE SOPO SENG NGEREKEN (red: Bahasa Malangan, Lah kami sendiri siapa yang peduli) ANGKOT YANG LAHIR DARI RAHIM NEGARA, YANG DIBIDANI DENGAN UNDANG2 DAN PERDA, TAPI KO GAK ONOK SENG PEDULI. BUKAN IRI TAPI KETIMPANGAN RASA KEADILAN. MERDEKA!!"

Lebih lanjut, pria yang akrab dengan sapaan Jaya ini menjelaskan, selama ini Dishub Kota Malang memang tidak pernah memberikan THR kepada sopir angkot. Tahun sebelumnya, pemerintah hanya memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada angkot sebagai bagian dari upaya mengendalikan inflasi daerah.

"Tahun lalu ada subsidi BBM, tapi kalau tahun ini tidak ada karena memang tidak ada amanah dari pemerintah pusat," jelasnya.

Meskipun telah mengetahui adanya banner tulisan tersebut, Jaya mengaku belum menerima laporan ataupun keluhan dari sopir angkot

mengenai ketimpangan perhatian pemerintah.

"Selama ini juga mereka sebenarnya memahami posisinya. Saya juga sudah tahu ada tulisan seperti itu, cuma di satu angkutan itu saja. Yang jelas kami tidak ada kewenangan untuk mengeluarkan itu (THR)," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri S a s t y a w a n , mengungkapkan tahun ini terdapat skema baru dalam pemberian tunjangan bagi pekerja informal, yakni Bonus Hari Raya (BHR).

"Tahun ini ada yang berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu ada BHR dan THR. Untuk ojek online, mereka harus mendapatkan BHR karena di Kota Malang ada tiga aplikasi resmi, yaitu Grab, Gojek, dan Maxim. Besarannya diatur berdasarkan kesepakatan masing-masing aplikasi dan pengemudi," terang Arif.

Arif menegaskan, aturan THR dan



Satu unit angkot di Kota Malang terpasangi banner mempertanyakan soal THR ke pemerintah, Rabu (19/3/2025) kemarin. (Santi/Lenteratoday)

BHR memiliki perbedaan mendasar. THR diatur dalam regulasi ketenagakerjaan dan wajib dicairkan maksimal H-7 Lebaran. Sementara BHR bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan penyedia layanan transportasi online.

Namun, terkait tuntutan sopir angkot, Arif juga menyebut hal tersebut tidak bisa diberikan karena tidak adanya keterikatan dengan perusahaan tertentu, sehingga tidak termasuk dalam aturan pemberian THR ataupun BHR seperti pekerja formal. (Santi/Dya)

Demonstrasi Besar di Istanbul, Tolak Penahanan Rival Erdogan

Ribuan orang berdemo memprotes penahanan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, pada Rabu (19/3/2025)(AFP)



ISTANBUL - Ribuan warga Turki turun ke jalan untuk memprotes penangkapan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu. Imamoglu dikenal sebagai saingan politik utama Presiden Recep Tayyip Erdogan. Penangkapan ini mendapat kecaman dari pihak oposisi yang menyebutnya sebagai "kudeta".

Protes terhadap penahanan Imamoglu juga marak di media sosial, seperti dilansir Reuters, Kamis (20/3/2025), dengan otoritas Turki menahan 37 orang yang dituduh memposting pesan "provokatif" terkait penahanan sang Wali Kota Istanbul tersebut.

Imamoglu ditahan sejak Rabu

(19/3/2025) waktu setempat, atas berbagai tuduhan termasuk gratifikasi dan membantu kelompok teroris.

Partai oposisi utama, Partai Rakyat Republik (CHP), yang menaungi Imamoglu mengecam penahanan itu sebagai "upaya kudeta terhadap presiden berikutnya". Penangkapan Imamoglu itu dilakukan sebelum dia maju capres, di mana dalam beberapa jajak pendapat, pria berusia 54 tahun itu mengungguli Erdogan.

Ribuan demonstran turun ke jalan dan menggelar aksi protes di kampus-kampus yang ada di berbagai kota, termasuk Istanbul dan Ankara. Dalam aksinya, para demonstran

meneriakan slogan-slogan anti-pemerintah.

"Mereka dengan terburu-buru menahan Wali Kota kami, yang kami pilih dengan suara kami. Saya tidak menganggap ini praktik yang demokratis, dan saya mengutuknya," ucap salah satu pendukung oposisi, Ali Izar.

Aksi protes tetap digelar meskipun larangan berkumpul selama empat hari diberlakukan setelah penahanan Imamoglu.

Dalam upaya meredam aksi protes, otoritas Turki melakukan penindakan keras terhadap akun-akun media sosial yang dinilai provokatif.

Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, dalam pernyataan via media sosial X mengumumkan bahwa otoritas Ankara mengidentifikasi 261 akun media sosial, termasuk 62 akun yang berbasis di luar negeri, yang dianggap memberikan "postingan provokatif yang memicu kejahatan dan kebencian".

Yerlikaya menegaskan pemerintah terus berupaya melacak para tersangka lainnya. Dia menambahkan bahwa 18,6 juta postingan tentang Imamoglu dibagikan di media sosial X dalam waktu 24 jam setelah penahannya.

Tidak hanya melarang unjuk rasa dan menahan pemilik akun media

sosial yang dianggap provokatif, otoritas Turki juga menutup akses ke beberapa media sosial.

Kantor kepala Kejaksaan Umum Istanbul mengumumkan bahwa otoritas berwenang juga menyita sebuah perusahaan konstruksi yang dimiliki bersama oleh Imamoglu. Disebutkan kantor jaksa bahwa kendali atas Imamoglu Construction, Trade and Industri diambil alih oleh pengadilan.

Jerman, Prancis, Uni Eropa, dan Dewan Eropa mengecam penahanan Imamoglu, sementara Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa mereka mengharapkan Ankara bertindak dengan cara "yang menghormati hak-hak warga negaranya." Human Rights Watch menyebut tuduhan tersebut "bermotif politik dan tidak berdasar", dan mengatakan ia harus segera dibebaskan.

Kantor kejaksaan Istanbul mengatakan total 100 orang, termasuk wartawan dan pebisnis, diduga terlibat dalam kegiatan kriminal terkait tender tertentu yang diberikan oleh pemerintah kota, sebagai bagian dari penyelidikan pertama.

Dikatakannya, penyelidikan kedua menuduh Imamoglu dan enam orang lainnya membantu PKK, yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh Turki dan sekutu Baratnya. (Reuters,ist/nei)

175 Tawanan Perang Dibebaskan dalam Pertukaran Ukraina-Rusia

CHERNIHIV - Ukraina dan Rusia menukar tawanan perang dengan masing-masing membebaskan 175 anggota militer pada Rabu (19/3/2025).

Pertukaran ini dilakukan setelah adanya pembicaraan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam hal ini, Rusia juga menyerahkan 22 tawanan Ukraina yang mengalami luka berat, seperti dikonfirmasi oleh kedua pihak.

Dikutip dari Reuters, Kamis (20/3/2025), di antara tawanan yang dibebaskan, ada Serhii, seorang tawanan yang menghabiskan tiga tahun sepuluh hari di penahanan Rusia.

"Di mana saja saya tidak dipenjarakan? Saya sempat ditahan di Luhansk, lalu dikirim ke Bashkortostan yang sangat jauh. Itu adalah tempat yang paling kejam. Kami disiksa dengan sangat brutal. Banyak teman saya yang tidak bertahan, beberapa bahkan kehilangan akal sehat," kata Serhii.

Saat akhirnya bebas, Serhii langsung menelepon istrinya.

Di tempat lain, Ruslan, seorang tawanan lain yang baru dibebaskan, mengungkapkan perasaan campur aduknya.

"Secara fisik saya merasa buruk, tetapi saya sangat bahagia bisa kembali ke rumah," ujarnya.

Seorang reporter yang mewawancarainya menenangkan Ruslan, "Kamu bisa menatap mata kami dan tidak perlu lagi menaruh tangan di belakang punggungmu."

Ruslan tersenyum kecil dan menjawab, "Terima kasih! Maaf, saya sudah terbiasa. Ini kebiasaan seperti budak. Kami dipukuli dan disiksa selama tiga tahun."

Kebebasan bagi para tawanan perang membawa harapan bagi mereka yang masih menunggu kabar dari orang-orang tercinta.

Seorang pria dengan mata penuh harap menunjukkan foto putranya kepada tawanan yang baru dibebaskan.

"Apakah kalian melihatnya? Ini anak saya, Ivan Roman. Mereka bilang dia mungkin akan menjadi yang berikutnya dalam pertukaran,"



Tawanan perang (POW) Ukraina yang dibalut bendera nasional berkumpul saat mereka kembali setelah pertukaran, di tengah serangan Rusia terhadap Ukraina, di lokasi yang dirahasiakan di Ukraina, (19/3/2025). (Reuters)

katanya penuh harap.

Para tawanan yang dibebaskan saling berbagi cerita, merokok bersama, dan berpelukan dengan erat, seolah merayakan kehidupan yang baru mereka dapatkan kembali.

Sementara itu, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, dalam pernyataannya di media sosial X, menyebut pertukaran ini sebagai salah satu yang terbesar.

Ia menegaskan bahwa 22 tawanan Ukraina yang mengalami luka berat akan segera menerima perawatan yang mereka butuhkan.

"Semua dari mereka akan segera mendapatkan bantuan medis dan psikologis yang diperlukan," ujar Zelenskyy.

Pertukaran tawanan ini menjadi titik terang di tengah perang yang terus berkecamuk antara Rusia dan Ukraina. (Reuters,ist/nei)

Ozempic, Obat Diabetes yang Jadi Tren Diet

Ozempic adalah obat suntik semaglutide yang awalnya dirancang untuk mengontrol gula darah penderita diabetes tipe 2. Namun, efeknya dalam memperlambat pengosongan lambung dan menekan nafsu makan membuatnya populer sebagai alat bantu penurunan berat badan. Ozempic digunakan oleh penderita diabetes tipe 2 dan orang-orang yang ingin menurunkan berat badan. Informasi valid tentang Ozempic dapat diperoleh dari dokter atau sumber-sumber kesehatan terpercaya.

Sebaiknya, kita berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan Ozempic untuk diet. Banyak orang tertarik dengan Ozempic karena efeknya dalam menurunkan berat badan dengan cara memperlambat pengosongan lambung dan menekan nafsu makan. Kepopuleran Ozempic juga dipicu oleh beberapa selebriti yang menggunakannya. Benarkah Ozempic efektif untuk diet?

Informasi ini bertujuan edukasi, bukan anjuran. Selalu konsultasikan dengan dokter sebelum mencoba metode penurunan berat badan apa pun, termasuk dengan Ozempic.

Mengenal Lebih Dekat Ozempic
Ozempic bekerja dengan meniru GLP-1, hormon alami pengatur gula darah. Ia meningkatkan produksi insulin saat gula darah tinggi dan mengurangi produksi glukagon, hormon penaik gula darah. Efek samping yang umum termasuk mual, muntah, diare, sembelit, perut kembung, sendawa, dan nyeri ulu hati. Efek samping serius meskipun jarang terjadi.

Penting untuk diingat bahwa Ozempic bukan solusi ajaib. Diet sehat dan olahraga tetap kunci utama penurunan berat badan yang berkelanjutan. Ozempic hanya sebagai pendukung, bukan pengganti gaya hidup sehat. Jangan pernah memulai pengobatan tanpa konsultasi dokter. Efektivitas dan keamanan Ozempic bervariasi antar individu.

Apakah Ozempic efektif untuk diet?

Ozempic memang ditujukan untuk terapi pengobatan diabetes tipe 2. Meski begitu, obat ini juga efektif untuk menurunkan berat badan sehingga banyak orang menggunakan Ozempic untuk diet.

Studi dalam jurnal Jama Network Open melakukan penelitian pada 408 pasien yang diberikan Ozempic dengan dosis 1,7 mg atau 2,4 mg per minggu. Peserta mengalami penurunan berat badan sebesar 5,9% pada bulan ketiga dan 10,9% pada bulan keenam.

Meski efektif untuk menurunkan berat badan, penggunaan obat Ozempic untuk diet sebenarnya belum disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA).

Berbeda halnya dengan obat Wegovy yang sama-sama mengandung semaglutide, obat ini telah lebih dulu disetujui penggunaannya untuk menurunkan berat badan.

Untuk itu, konsultasikan dahulu dengan dokter sebelum menggunakan obat ini untuk menurunkan berat badan.

Secara lebih lengkapnya, berikut cara kerja Ozempic dalam menurunkan berat badan.

Memperlambat pengosongan lambung
Obat Ozempic dapat membantu diet karena kemampuannya untuk memperlambat proses pengosongan makanan dari lambung. Dengan memperlambat proses ini, makanan akan bertahan lebih lama di dalam lambung sehingga penyerapan zat gizi dan gula ke dalam pembuluh darah menjadi lambat.

Hal ini tidak hanya mampu mencegah lonjakan gula darah, tetapi juga membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Alhasil, efek ini mencegah asupan makanan yang berlebihan.

Menahan nafsu makan

Manfaat obat Ozempic lainnya untuk program diet adalah kemampuannya dalam menekan nafsu makan. Mengutip Cleveland Clinic, Ozempic bekerja dengan meniru hormon GLP-1. Ketika jumlah hormon GLP-1 meningkat, molekul-molekul hormon ini akan mengirim sinyal ke otak untuk memberitahu bahwa tubuh sudah kenyang.

Dengan demikian, Anda tidak mudah merasa lapar sehingga bisa mengontrol asupan makanan untuk mendukung penurunan berat badan.

Mengurangi lemak di perut

Obat Ozempic tidak hanya membantu menurunkan berat badan secara keseluruhan, tetapi juga dapat mengurangi lemak visceral, yakni penumpukan lemak visceral dikaitkan dengan berbagai risiko penyakit, termasuk penyakit jantung, demensia, tekanan darah tinggi, atau gangguan fungsi hati.

Studi dalam Journal of the Endocrine Society melakukan penelitian pada orang dewasa dengan kelebihan berat badan atau obesitas tanpa diabetes yang diberikan obat semaglutide untuk mengetahui efeknya pada komposisi tubuh.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pasien yang mengonsumsi obat semaglutide mengalami penurunan total lemak tubuh sebanyak 19,3%, sedakan lemak di perut berkurang sebanyak 27,4 persen.

Efek samping obat Ozempic

Terdapat beberapa risiko, baik kondisi ringan maupun berat, yang mungkin timbul dari penggunaan obat Ozempic untuk diet. Berikut ini beberapa efek samping Ozempic.

Gangguan pencernaan. Efek samping yang umum terjadi dari penggunaan obat Ozempic adalah gangguan pencernaan, meliputi mual, muntah, sakit perut, diare, atau konstipasi. Pankreatitis. Dalam beberapa kasus, Ozempic dapat menyebabkan pankreatitis, yakni peradangan pada pankreas.

Gangguan ginjal. Penggunaan obat Ozempic dalam jangka panjang bisa berisiko menyebabkan gangguan pada ginjal, terutama pada orang yang sudah memiliki masalah ginjal sebelumnya. Reaksi alergi.

Para beberapa orang, penggunaan obat ini dapat memicu reaksi alergi serius, seperti bengkak pada wajah, bibir, atau tenggorokan, kesulitan bernapas, serta gatal yang parah. Hipoglikemia. Penurunan penglihatan. (nei,ist/dya)



Mobil Listrik Lamborghini, Bertenaga 1.900 Daya Kuda!

LAMBORGHINI, produsen mobil super terkenal, sekarang beralih ke mobil listrik setelah sebelumnya ragu-ragu, membuktikan komitmennya pada teknologi ramah lingkungan.

Setelah sebelumnya menegaskan tidak tertarik untuk mengembangkan kendaraan listrik, pabrikan asal Italia ini kini siap meluncurkan model Battery Electric Vehicle (BEV) pertamanya dalam waktu dekat.

Menurut laporan dari Paultan, mobil listrik perdana Lamborghini ini akan berbasis pada purwarupa Lanzador Concept yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2023.

Model ini akan mengusung desain yang menggabungkan elemen SUV dan coupe, dengan konfigurasi empat tempat duduk yang tetap mempertahankan sensasi berkendara khas Lamborghini yang sangat ikonik.

CEO Volkswagen Group, Oliver Blume, mengungkapkan bahwa Lamborghini BEV pertama ini akan dilengkapi dengan motor penggerak berkekuatan 1.000 kW, yang setara dengan sekitar 1.341 daya kuda.

Namun yang lebih mengesankan lagi, motor tersebut mampu menghasilkan daya maksimum hingga 2.000 PS (1.900 daya kuda), angka yang sangat besar untuk sebuah mobil listrik.

Blume menegaskan bahwa mobil ini dirancang secara spesifik untuk Lamborghini, memastikan bahwa meskipun menggunakan teknologi elektrifikasi, karakteristik emosional dan performa Lamborghini tetap dipertahankan.

"Ini sangat spesifik dibuat khusus untuk Lamborghini. Saya berjanji,

model ini tetap adalah sebuah Lamborghini yang khas, sesuatu yang emosional," ungkap Blume, seraya menambahkan bahwa produksi mobil listrik ini akan dilakukan di pabrik utama Lamborghini yang terletak di Sant'Agata, Italia.

Sementara itu, CEO Lamborghini, Stephan Winkelmann, menegaskan bahwa pihaknya tetap konsisten dengan strategi elektrifikasi yang sudah direncanakan.

Meskipun Lamborghini selama ini lebih dikenal dengan mesin pembakaran internal (ICE), mereka berkomitmen untuk menghadirkan mobil listrik sebelum tahun 2030.

Winkelmann menambahkan bahwa keputusan untuk memperkenalkan model hibrida dan elektrik dalam beberapa

tahun terakhir merupakan upaya keras yang tepat bagi perusahaan untuk menuju masa depan.

"Kami telah bekerja sangat keras selama empat tahun terakhir, dan ini adalah langkah yang tepat," kata Winkelmann.

"Kami akan lebih fokus pada pendekatan bertahap menuju elektrifikasi. Sejauh ini tidak ada isu soal keterlambatan peluncurannya," tambahnya.

Penting untuk dicatat bahwa mobil listrik Lamborghini ini tidak akan menggantikan model dengan mesin pembakaran internal yang sudah ada,

melainkan akan menjadi anggota keluarga baru yang berbeda.

Dari segi penamaan, bentuk, hingga target pasar, mobil listrik Lamborghini ini akan membawa identitas baru yang lebih sesuai dengan konsep mobil listrik, namun tetap mempertahankan karakteristik khas Lamborghini yang penuh dengan emosi dan performa tinggi.

Dengan kehadiran mobil listrik pertama Lamborghini yang diprediksi akan menembus angka 1.900 daya kuda, lamborghini kini semakin dekat dengan masa depan elektrifikasi.

Mereka menegaskan bahwa mereka siap untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dalam dunia otomotif mewah dan performa tinggi, bahkan di era kendaraan listrik. (ne,ist/dya)



HARIAN **LENTERA**
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

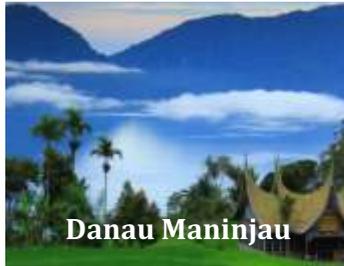
PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Danau Terindah di Sumatera Barat, Pilihan Terbaik Liburan Lebaran



Danau Singkarak



Danau Maninjau



Danau Kembar



Danau Talang



Danau Pauh

SUMATERA Barat memiliki keindahan alam yang luar biasa dan tidak kalah dengan destinasi wisata populer lainnya di Pulau Sumatera. Provinsi Sumbar ini memiliki bentang alam yang lengkap, mulai dari gunung, bukit, lembah, hingga pantai dan lautan serta danau terindah yang sangat cocok untuk liburan lebaran Idulfitri 2025.

Berikut adalah 7 danau terindah dan cantik di Sumatera Barat, yang bak surga tersembunyi!. Dikutip dari Youtube BETTA FISH MINANG, Rabu 19 Maret 2025.

Danau Singkarak

Danau Singkarak adalah danau terbesar di Sumatera Barat dan yang terluas kedua di Sumatera setelah Danau Toba. Terletak di antara Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, danau terindah ini menjadi ikon wisata yang wajib dikunjungi. Dengan panjang mencapai 21 km, Singkarak menawarkan panorama alam yang luar biasa, apalagi saat matahari terbenam.

Pembentukan Danau Singkarak terjadi akibat proses tektonik yang dipicu oleh Sesar Sumatera, yang menyebabkan terbentuknya Cekungan Singkarak Solok. Cekungan ini terbentuk dari akumulasi bahan vulkanik yang terkendali, yang berasal dari

letusan gunung berapi di sekitarnya, dan akhirnya membentuk badan air yang kita kenal sebagai Danau Singkarak.

Danau Maninjau

Maninjau merupakan danau vulkanik yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Danau terindah yang terbentuk dari letusan Gunung Sitinjau ini menawarkan pemandangan yang memukau. Dikelilingi oleh perbukitan hijau, Maninjau kerap dijadikan destinasi favorit untuk bersantai dan menikmati ketenangan alam.

Daya tarik Danau Maninjau terletak pada keindahan panorama alamnya yang bisa dilihat dari kejauhan. Karenanya, tidak lengkap jika membahas Danau Maninjau tanpa membahas spot ideal untuk menikmatinya. Terutama bagi para pecinta fotografi pastinya tidak ingin melewatkan keindahan tersebut tanpa mengabadikannya.

Danau Diatas dan Danau Dibawah (Danau Kembar)

Kedua danau ini sering disebut sebagai Danau Kembar karena lokasinya yang berdekatan di Kabupaten Solok. Meski namanya Danau Diatas dan Danau Dibawah, posisi mereka sebenarnya berlawanan, Danau Dibawah berada lebih tinggi dari Dana

u Diatas. Disebut Danau Kembar karena lokasi kedua danau ini hanya berjarak sekitar 300 meter, dan hanya terpisah oleh sebuah bukit saja.

Lokasi Danau Diatas terletak di pinggir jalan dari Padang-Muara Labuh, sementara Danau Dibawah terletak di Nagari Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya.

Danau Talang

Danau Talang merupakan reservoir dari Gunung Talang. Kawasan ini memiliki potensi keindahan serta dikelilingi rangkaian bukit-bukit dari Gunung Talang. Airnya yang jernih dikelilingi oleh vegetasi hijau serta hamparan lahan pertanian membuatnya terlihat begitu alami.

Keindahan lainnya berupa pinggir danau yang dikelilingi oleh bebatuan besar yang tidak jelas asal usulnya. Konon menurut cerita, batu-batu besar itu berasal dari semburan Gunung Talang yang memuntahkan isinya saat erupsi.

Danau Tarusan Kamang

Danau Tarusan Kamang merupakan danau unik yang terletak di Kabupaten Agam. Danau ini sering disebut sebagai danau ajaib karena airnya dapat muncul dan menghilang dalam waktu yang tidak tentu. Saat musim hujan, air danau akan memenuhi lembah, sedangkan di musim kemarau,

airnya surut hingga hampir kering. Fenomena ini menjadikan Danau Tarusan Kamang sebagai destinasi wisata yang menarik dan penuh misteri.

Daya Tarik Danau ini dikelilingi oleh bukit-bukit hijau dan panorama pedesaan yang indah, menawarkan suasana yang tenang dan asri. Pengunjung dapat menikmati pemandangan matahari terbenam yang spektakuler di sini.

Danau Pauh

Danau Pauh adalah permata tersembunyi di Kabupaten Solok Selatan. Danau ini masih relatif belum banyak dijamah oleh wisatawan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk berlibur dengan ketenangan.

Dikelilingi oleh hutan tropis yang lebat dan berada di ketinggian, suasana di Danau Pauh terasa sejuk dan menenangkan. Airnya yang tenang seperti kaca menciptakan efek cermin yang memukau, mencerminkan Gunung Masurai yang megah di kejauhan. Ini adalah pemandangan yang tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga meresapi jiwa Anda dengan ketenangan dan keindahan alam. Salah satu pemandangan yang paling mencolok di Danau Pauh adalah Gunung Masurai yang menghiasi latar belakang.

(ne,ist/dya)

Usai UU TNI ... (dari Hal 1)

INI cerita Raka, ojol yang dikira mahasiswa jadi korban pengeroyokan oleh oknum polisi saat membubarkan massa demo di bawah Flyover dekat JCC, Jakpus, Kamis (20/3/2025).

Saat ditanya, sosok tersebut ternyata bukan mahasiswa, melainkan seorang ojol yang tengah berhenti untuk menyaksikan demo di DPR.

"Lagi di tempat parkir. Mahasiswa bubar. Pas mahasiswa udah dipukul mundur semua, gue masih di sini tuh (di bawah flyover dekat JCC), gue kira gue enggak kena, ternyata kena juga," ujar Raka kepada wartawan di lokasi.

Dia mengaku tiba-tiba ditangkap oleh petugas dan ditanya "Kamu mahasiswa ya?" Raka pun menjawab bukan.

Akan tetapi, tak sempat menjelaskan siapa dirinya lebih lanjut rombongan kepolisian lainnya langsung menghampiri Raka dan memukulinya.

"Saya diem aja meringkuk (saat mulai dipukuli)," ujarnya.

Raka terlihat diperban dibagian kepala akibat aksi pemukulan tersebut.

Dikerahui, massa aksi di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, bubar usai dipukul mundur oleh aparat kepolisian menggunakan water canon, Kamis malam (20/3/2025).

Mulanya, para polisi telah bersiap memukul mundur sejak pukul 19.50 WIB. Massa dipukul mundur ke arah flyover Jalan Gerbang Pemuda.

Percobaan polisi memukul mundur massa memakan waktu hingga pukul 20.09 WIB. Massa benar-benar tidak bubar sampai ke flyover tersebut.

Cerita berbeda datang dari Semarang yang melakukan aksi serupa. Sebanyak empat peserta unjuk rasa yang menolak rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI masih ditahan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Sebelumnya polisi menangkap lima orang dan dilepaskan satu.

Keempat orang yang ditangkap tersebut adalah mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung, mahasiswa Soegijapranata Catholic University, sopir mobil komando, dan operator sound system.

"Ketika kami melakukan upaya pendorongan keluar, mereka berupaya untuk berperilaku anarkis sehingga kami amankan dulu. Kami lakukan pendalaman dan menyelidikannya oleh Satreskrim Polrestabes Semarang," kata Kapolres Semarang Komisaris Besar Muhammad Syahduddi.

Upaya membebaskan empat orang

tersebut masih dilakukan hingga kini. Sejumlah pendamping dan peserta aksi masih bertahan di Polres Semarang.

Unjuk rasa menolak RUU TNI yang kini telah disahkan di kompleks Kantor Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah itu berakhir ricuh. Aparat kepolisian mendorong massa aksi yang mencoba masuk ke Kantor DPRD Jawa Tengah.

Polisi beberapa kali menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa. Para demonstran membubarkan diri sekitar pukul 18.00 setelah sejumlah orang ditangkang.

Di Yogyakarta, sebuah tenda juga tampak sudah berdiri di halaman DPRD DIY. "Rencananya kita akan menginap. Kemudian, kita sudah berkoordinasi, belum tahu nanti menginapnya bisa sehari, bisa dua hari, bisa tiga hari," kata humas Jogja Memanggil, Marsinah, di lokasi, Kamis (20/3/2025).

"Kita tetap akan melakukan protes sampai kemudian undang-undang ini dicabut dikembalikan lagi bahwa tidak ada yang namanya dwifungsi ABRI (TNI). Apalagi dengan adanya revisi ini, tidak sekadar dwifungsi ABRI, tetapi sebenarnya masuk ke dalam multiple fungsi ABRI," katanya.

Jogja Memanggil yang terdiri dari elemen organisasi masyarakat sipil hingga mahasiswa akan tetap bertahan di gedung DPRD dengan mengedepankan prinsip dan tata cara yang anti-kekerasan.

"Kita akan tetap stay di sini sampai kemudian pemerintah betul-betul memastikan adanya pembatalan revisi undang-undang dwifungsi ABRI," bebarnya.

Selama proses menginap ini, massa aksi akan mengisi dengan penyampaian aspirasi, orasi, pembacaan puisi, musikalisasi puisi, dan diskusi.

"Karena cara-cara inilah sebenarnya yang juga kita gunakan sebagai upaya untuk memperkuat soliditas gerakan kita dalam melawan rezim otoriter," katanya.

Bakal Digugat Mahasiswa UI

Cara berbeda dilakukan sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia yang akan menggugat revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI atau UU TNI yang baru saja disahkan.

Tujuh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia akan mendaftarkan gugatan uji materi hasil revisi tersebut ke Mahkamah Konstitusi Jumat, 21 Maret 2025, pukul 10.00 WIB. Pemohon utama gugatan, Abu Rizal Biladina, mengatakan permohonan gugatan UU TNI tersebut diajukan karena

prosesnya dianggap inkonstitusional.

"Kami akan memohon pengujian formil UU TNI karena tata cara pembentukan UU-nya menyalahkan regulasi yang ada (tidak masuk Program Legislasi Nasional) dan tidak meaningful participation (pelibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang)," kata Rizal.

Revisi UU TNI baru saja disahkan DPR, namun belum diundangkan dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Rizal mengatakan memang ada dua mazhab yang menyebut undang-undang bisa digugat setelah disahkan atau digugat setelah diundangkan.

Kejanggalan dan pelanggaran penyusunan revisi Undang-Undang TNI juga telah dipeberikan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Peneliti PSHK, Bugivia Maharani, mengatakan pembahasan revisi UU TNI melanggar prosedur pembentukan undang-undang dan tidak sah menjadi RUU prioritas 2025.

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang memuat RUU prioritas pada 2025 disahkan melalui Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 pada 19 November 2025. Namun, Maharani menuturkan bahwa pada Lampiran II Keputusan DPR RI itu tidak tercantum judul revisi UU TNI sebagai salah satu RUU yang diprioritaskan pada tahun 2025.

Maharani membeberkan tiga kejanggalan. Pertama, pengambilan keputusan untuk memasukan RUU revisi UU TNI tidak masuk dalam agenda rapat paripurna.

"Secara tiba-tiba, ketua sidang pada saat itu, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir meminta persetujuan anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna untuk menyetujui dimasukkannya revisi UU TNI dalam Prolegnas 2025 sebelum keseluruhan agenda rapat dilaksanakan," ujar Maharani dalam keterangan tertulis.

Menurut Maharani, Pasal 290 ayat (2) Tata Tertib DPR RI menegaskan bahwa perubahan agenda rapat, termasuk rapat paripurna hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan kepada Badan Musyawarah paling lambat dua hari sebelum rapat dilaksanakan.

"Namun hal itu tidak dilaksanakan dalam kasus ini, terbukti sejak awal tidak ada agenda tersebut yang dibacakan oleh ketua rapat paripurna," tuturnya.

Kejanggalan kedua adalah pertimbangan memasukan revisi UU TNI dalam Prolegnas 2025 yang mendasarkannya pada Surat Presiden Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025.

Maharani menegaskan, pertimbangan utama seharusnya berasal dari Badan Legislasi, bukan desakan dari Presiden melalui surat.

Kejanggalan ketiga, Maharani menilai keberadaan Surat Presiden juga janggal. Sebab, isinya menunjukan wakil pemerintah membahas revisi UU TNI. Dalam surat bertanggal 13 Februari 2025 itu belum ada keputusan resmi DPR menjadikan revisi UU TNI masuk dalam Prolegnas 2025.

"Seharusnya surat presiden menunjukan perwakilan pemerintah untuk membahas suatu RUU dikirimkan setelah ada keputusan DPR terkait kepastian pembahasan, atau bahkan ada surat resmi terlebih dahulu yang mengirimkan draft RUU dan Naskah Akademik kepada Presiden," katanya.

Puan: Tetap Berlirinsip Demokrasi Supremasi Sipil

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang sudah disetujui untuk menjadi undang-undang, tetap akan berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi.

Menurut dia, pembahasan RUU TNI yang sudah selesai oleh Komisi I DPR RI, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi supremasi sipil, hak asasi manusia serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan," kata Puan saat memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Dia menjelaskan, fokus substansi perubahan yang pertama dalam RUU tersebut adalah pada Pasal 7 terkait dengan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang atau OMSP. Puan menyatakan, pasal ini menambah cakupan tugas pokok TNI yang semula 14, menjadi 16 tugas pokok.

Lalu untuk fokus kedua pada perubahan UU TNI, yaitu terkait dengan penempatan prajurit TNI aktif pada Kementerian dan lembaga (K/L) yang ada dalam Pasal 47. Dari yang awalnya 10 menjadi 14 posisi jabatan bagi TNI aktif di K/L.

Selanjutnya, fokus ketiga pada perubahan UU TNI adalah soal penambahan masa dinas keprajuritan. Hal ini disepakati DPR bersama Pemerintah karena berkaitan dengan sisi keadilan bagi prajurit yang telah setia mengemban tugas menjaga pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Berdasarkan hasil pembahasan substansi materi, menyepakati dan menyetujui RUU TNI yang dibahas fokus hanya pada 3 substansi utama," kata dia. (din, wid, ist, ant, tmo, nar/dya)

Garuda Tertunduk di Sydney

Digebuk Australia 5-1, Peluang ke Pildun Makin Berat

SYDNEY- Timnas Indonesia harus menelan pil pahit di kandang Timnas Australia pada putaran ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis (20/3/2025) sore WIB. Digebuk dengan skor 5-1, menjadi kekalahan terburuk Timnas RI selama kualifikasi

Pada babak pertama, Timnas RI harus menerima kekalahan telak 3-0.

Gol pertama Australia dicetak pada menit ke-18 lewat gol dari titik penalti yang dieksekusi Martin Boyle. Tak berselang lama, Australia berhasil menggandakan keunggulan lewat serangan balik cepat, sehingga Nishan Velupillay berhasil mencetak gol di menit ke-20.

Timnas RI berusaha menyerang untuk membalas ketinggalan. Namun hasilnya malah harus kebobolan kembali lewat gol yang diciptakan Jackson Irvine di menit ke-34.

Timnas RI berpeluang unggul lewat titik penalti yang diberikan kepada Timnas RI, setelah striker Rafael Struick dilanggar. Namun Kevin Diks tidak bisa mengeksekusi tendangan pada menit ke-8.

Pada babak kedua, permainan kembali berjalan dengan cepat. Timnas terus berusaha mencetak gol.

Sayangnya, malah kebobolan kembali pada menit ke-61 lewat gol sundulan yang diciptakan Lewis Miller.

Pada menit ke-78 akhirnya Timnas berhasil mencetak gol lewat aksi luar biasa pemain baru nomor 10, Ole Romeny.

Serangan yang dibangun dari sisi kiri hampir saja menambah gol untuk Timnas, sayangnya tendangan Eliano Reijnders masih bisa ditepis.

Akan tetapi Timnas harus kembali kebobolan pada menit ke-90 lewat sundulan Jackson Irvine.

Hasil 5-1 menjadi kekalahan terburuk yang diraih Timnas RI selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas harus kebobolan 5 gol dalam satu pertandingan.

Hasil ini tentunya harus menjadi evaluasi pelatih baru Timnas Patrick Kluivert, yang datang untuk menggantikan Shin Tae Yong.

Dengan hasil ini, peluang Indonesia untuk masuk Piala Dunia makin berat. Dikarenakan, harus memenangkan 3 pertandingan sisa, yaitu lawan Bahrain, RRC dan Jepang.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan terus mendukung Tim Nasional Indonesia menyusul hasil buruk yang diderita skuad Garuda saat menghadapi Australia di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney, Kamis.

"Saya tetap dukung Tim Nasional sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang. Karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya," kata Erick dalam pernyataan di akun media sosial Instagram.



Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes (3/tengah kanan) menyundul bola ke gawang Australia pada laga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga di Stadion Sydney, Sydney, Australia, Kamis (20/3/2025). (AP Photo)

Terganjil Chemistry Usai Ganti Pelatih

Terpisah Pengamat sepak bola M. Kusnaeni buka suara soal kekalahan Timnas Indonesia dari Australia dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Dia menyebut kekalahan itu disebabkan karena chemistry Timnas Indonesia belum terbentuk usai pergantian pelatih.

"Pemain-pemain Indonesia kualitasnya bagus, tapi secara permainan dan secara tim belum cukup matang, chemistry belum

terbentuk, kerja sama antar pemain belum terjalin," kata Pria yang kerap disapa Bung Kus ini dalam tayangan sebuah stasiun televisi.

Bung Kus mengatakan setiap kesalahan kecil yang dilakukan pemain Timnas Indonesia bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Timnas Australia. Ini menjadi salah satu hal yang membedakan Timnas Indonesia dan Timnas Australia.

Bung Kus juga setuju dengan pernyataan Shin Tae-yong (STY) yang menyatakan bahwa minimnya waktu

latihan menjadi salah satu penyebab Indonesia kalah dari Australia. Ia menilai pelatih Timnas Indonesia yang baru Patrick Kluivert tidak punya waktu yang cukup untuk menangani detail-detail teknis.

"Contoh gol kelima itu yang terjadi melalui sundulan sebetulnya soal detail. Ketika situasi bola mati itu kan harus jelas siapa mengawal, siapa yang nanti di posisi sentral, siapa yang di posisi yang dekat, siapa posisi yang jauh. Itu Jay Idzes saja sampai kebingungan apa yang harus dia lakukan ketika situasi bola mati itu dan menjadi gol," jelasnya.

Menurutnya, Patrick Kluivert harus memperhatikan detail-detail kecil ketika melatih Timnas Indonesia. Sebab, detail-detail itu tidak dapat dilatih dengan waktu yang terbatas.

"Banyak detail-detail kecil yang tidak tertangani dengan baik dan itu yang kemudian dimanfaatkan oleh lawan," ucapnya.

Terpisah, Mantan pelatih Persis Solo, Rasiman, memberikan komentar mengenai hasil pertandingan Timnas Indonesia kontra Australia. Dia menyebut, kekalahan di Sydney wajar karena secara pengalaman dan kematangan tim Garuda kalah jauh. (wid,rls,ist/dya)

Debut Sang Pelatih Tercoreng #KluivertOut

KEKALAHAN Timnas RI 5-1 dari Australia membuat para supporter sepak bola tanah air geram. Pelatih baru Timnas, Patrick Kluivert pun diminta mundur. Hal ini pun bak mencoreng debutnya sebagai pelatih Timnas Indonesia.

Para penggemar tidak terima dengan hasil yang diraih Kluivert di pertandingan pertama. Karena sebelumnya ia yakin bisa memetik kemenangan.

Kekalahan yang diterima Timnas, juga menjadi kekalahan terburuk selama kualifikasi Piala Dunia. Karena kebobolan 5 gol, padahal waktu pertandingan pertama di Stadion GBK, tim yang dilatih Shin Tae Yong saat itu berhasil menahan imbang.

Sejak digantinya Shin Tae Yong dengan Patrick Kluivert, para supporter mengultimatum harus mendapatkan kemenangan saat melawan Australia.

Pada saat berita ini ditulis, tercatat sebanyak 30ribu lebih cuitan menggunakan tagar 'Kluivert Out'. Kebanyakan dari netizen mempertanyakan keputusan PSSI mengganti tim kepelatihan dari Shin Tae-yong ke Kluivert. Mereka tak mau lagi

percaya dengan proses.

"Kita gak menerima alasan 'butuh proses', 'butuh penyesuaian', 'butuh chemistry antara pelatih dan pemain'. Dari awal ganti pelatih udah di tuntutan wajib menang karena emang tim udah terbentuk. Harusnya gak ada alasan apapun," tulis akun @lal** dengan menggunakan tagar tersebut, dikutip pada Kamis (20/3/2025).

"M e m a l u k a n !!! #KluivertOut," komentar @atemo74429455

"Mengganti STY dgn Kluivert saja sdh kesalahan besar. Mustinya klu mau cari pelatih kelasnya yg sdh teruji. Woi ET kau suruh tuh anaknya Justin Kluivert yg main di Bournemouth bela Indonesia bkn belanda. Gak mau kan dia? #KluivertOut," tulis akun X @Umar***.

Selain itu, kebanyakan netizen yang juga merupakan supporter Timnas Indonesia mempertanyakan taktik yang digunakan oleh Kluivert. Mereka juga ramai-ramai mengaku rindu pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong.



Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert

Shin Tae-yong yang kini masih berada di Indonesia, berkesempatan melakukan nonton bareng (nobar) pertandingan melawan Australia di wilayah Jakarta Selatan.

Ia dari awal menit pertama sampai akhir pertandingan dengan setia menyaksikan jalannya pertandingan mantan anakasuhnya.

Hingga akhirnya hasil akhir pertandingan tak sesuai perkiraannya. "Kita harusnya bisa cetak gol di awal, tapi tak bisa memanfaatkan peluang menjadi gol, itu menjadi salah satu faktor kekalahan," ujar Shin Tae-yong. (wid, blo/dya)